

# EKONOMI DAN KEBIJAKAN EKONOMI DI JEPARA: SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS 1998

Arief Akhyat

## ABSTRACT

Jepara during the New Order is the most crucial urban related to the industrial development and the export policy. It is possible, and it seems to be the accepted view, that the cross intersection of personal and territorial arrangements were applicable in economic circumstances since the foreign traders took a close interaction seriously to the local entrepreneurs through economic and industrial system in Jepara. This conditions escalated over time, because economic and industrial system was not only an essential growth for commercial traffic, but also acted as a means of political and administrative affairs.

**Keywords:** the new order economy, industrial policy

## PENDAHULUAN

Sejak munculnya karya Richard Robinson (1986) yang mencoba menganalisis berbagai factor muncul dan berkembangnya kapitalisme di Indonesia, perdebatan mengenai kebijakan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi telah menumbuhkan diskusi-diskusi yang cukup beragam. Hal yang paling penting dalam melihat kebijakan pembangunan ekonomi ini oleh Robinson adalah munculnya kapitalisme pada dekade 1960-an sampai dengan 1990-an yang lebih dicirikan sebagai kapitalisme korporasi (*corporate capitalism economy*). Kapitalisme model seperti ini lebih mencirikan pada kapitalisme dengan kaum teknokrat dan birokrat termasuk militer sebagai pelaku dan agen kapitalisme.

Suatu hal yang menakjubkan dari model kapitalisme korporasi ini adalah meningkatnya surplus komoditas ekspor (*commodity export surplus*) yang ditandai dengan meningkatnya beberapa sektor riil. Peningkatan surplus komoditas ekspor yang didukung oleh sektor riil merupakan konsekuensi logis dari hasil kebijakan pengawasan ketat oleh komponen teknokrat-birokrat dan militer.

Peningkatan pengetatan pengawasan di sektor riil ini meningkatkan kalkulasi rasio ekspor-impior lokal paling tidak selama 3 dekade sejak krisis melanda pada

tahun 1998. Hal yang menarik dari gejala ini adalah peningkatan nilai ekspor sampai pada batas akhir tahun 2000, sama sekali tidak terpengaruh oleh situasi *current Market prices*. Hal ini dikarenakan para para pelaku ekonomi lebih banyak menempatkan *private capital export* terutama dari kalangan non-pribumi (pengusaha Asing). Politik ekonomi yang dijalankan mereka lebih mengarah pada sasaran menuju keseimbangan sektor riil sebagai *sub-budget* dan hanya difungsikan sebagai "agunan" untuk menyeimbangkan *current market prices* nya. Hal ini yang sering dipahami sebagai politik neraca keseimbangan (Booth, 1955)

Melalui politik negara keseimbangan tersebut, maka kapitalisme korporasi telah membangkitkan pertumbuhan sektor moneter pada tingkat lokal, dengan syarat terjaminnya apresiasi sektor non-moneter seperti emas dan perak dan bunga deviden yang mampu mengantisipasi cadangan moneter untuk bertransaksi.

Pada praktiknya, pergerakan sektor moneter pada tingkat lokal dan regional, justru menyebabkan semakin merosotnya *ratio of regional income* terutama pada skala sub-sektor. Namun di sisi lain, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal karena pergerakan sektor riil tetap eksis.

Pada perspektif regional dan lokal, kebijakan ini telah menciptakan keseimbangan *margin* pada *real exchange rate*. Hal ini karena dukungan tenaga kerja dan bahan baku yang melimpah serta kelonggaran kebijakan yang ada. Angin segar kebijakan itu telah mengalihkan perhatian pada sektor korporasi baru untuk menarik secara besar-besaran potensi ekonomi masyarakat (sektor publik) ke dalam lingkaran kapitalisme lokal. Ternyata, dalam praktiknya, kebijakan ini semakin membebani masyarakat bukan karena proses produksinya, tetapi beban pembiayaan infrastruktur yang semakin mahal dan tak terkendali dan semakin terciptanya korporasi baru di luar bidang ekonomi. Inilah yang kemudian dikenal dengan krisis ekonomi berubah menjadi krisis multi-dimensional (Bell, 1978).

Dampak yang paling jelas untuk daerah Jepara adalah munculnya friksi-friksi, kontradiksi-kontradiksi internal, inflasi yang tinggi pada jangka menengah, dan muncul paradoks pembangunan. Hal lain yang cukup relevan adalah ketidakjelasan sirkulasi budget (*unbudgetable income circulation*) dan defisit dalam skala besar yang tidak tampak (*a large deficit in "invisible"*)

Tulisan ini ingin mencoba menganalisis tingkat valuabilitas kebijakan ekspor terutama industri mebel oleh Pemerintah Daerah Jepara serta implikasi sosial-ekonomi bagi pertumbuhan ekonomi Jepara.

## PARADOKS KEBIJAKAN EKONOMI 1998-2004.

Suatu hal yang menarik dari kasus usaha industri *mebel* sejak pada tahun 1998 adalah: **pertama**, ada asumsi bahwa dengan meningkatnya usaha ekspor produk mebel, pembangunan ekonomi Jepara, secara bertahap, akan semakin menghilangkan model kapitalisme korporasi sebagaimana yang lahir sejak Orde Baru. Asumsi ini tidak seluruhnya benar, karena kalau melihat pengalaman model kapitalisme korporasi pada zaman Belanda pada dekade terakhir pada Abad XIX, pernah terjadi lonjakan nilai ekspor mebel akibat banyaknya pialang dagang Eropa (kapitalisasi korporatif) terutama Belanda dan para pialang Timur Asing (terutama Cina) sebagai “agen” kapitalisme korporasi ini. Walaupun pada masa itu, politik kolonial lebih mengarah pada ekonomi pertanian dan perkebunan daripada industri besar, namun tidak sedikit mereka juga melakukan transaksi dagang hasil industri *mebel* yang mengalami *collapse*. (*Economic Bulletin*, 1938). Model kapitalisme korporatif ini kemudian tidak mampu membendung arus krisis pada tahun 1930.

**Kedua**, hubungan-hubungan ekonomi dengan melibatkan berbagai pelaku itu juga terjadi pada krisis pada tahun 1998 (Djafar, 2006). Walaupun pada saat krisis terjadi, justru pada saat ekspor mebel mengalami peningkatan yang signifikan dengan model kapitalisasi korporasi, namun bersamaan dengan itu, lambat laun, industri mebel juga mengalami depresi yang luar biasa. Lebih parah daripada krisis tahun 1930-an. Munculnya jenis-jenis industri substitusi mebel dengan hadirnya industri “rokok rakyat” adalah salah satu bentuk depresi yang hebat pada sektor industri, terutama mebel. Hebatnya kehancuran sub-sektor mebel di Jepara pada pasca krisis 1998, semakin memperkuat dugaan bahwa kapitalisme korporasi adalah bagian skenario penghancur krisis di tingkat lokal. Logika ekonominya adalah, semua proses ekonomi sub-sektor industri mebel dibiayai dengan dana internasional yang tidak *immune* dari kebijakan moneter internasional.

Respon terhadap krisis di Jepara pada tahun 1999, telah melahirkan korporasi baru yang lebih simple sebagai berikut:

- I. Korporasi antara eksportir asing (*westerner*) dengan pribumi.
- II. Eksportir asing dengan *private government*
- III. Pribumi dengan *private government*

Jenis korporasi yang pertama dan kedua, lebih cenderung pada penggunaan *high capital circulation*, sedangkan yang ketiga lebih cenderung menggunakan *low capital circulation*. Dari tiga pola korporasi di atas akan muncul kecenderungan paradoks sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pemahaman surplus komoditas ekspor, ketiga model korporasi tersebut lebih cenderung menguatkan dominasi *monetary account*, daripada *non-monetary account*, seperti jasa, sektor riil dan sebagainya. Hal itu akan berpengaruh terhadap rasio *income regional (ratio of regional income)*.
- b. Pada tingkat kebijakan moneter, model korporasi tersebut di atas sangat berpengaruh pula terhadap peningkatan nilai ekspor di satu sisi, namun juga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat rasio defisit "invisible" dan sirkulasi pendanaan yang tidak dimasukkan ke dalam daftar anggaran (*unbudgetable income circulation*) (Booth, 1995). Pada tataran model ini, peluang terjadi kebocoran anggaran dan korupsi menjadi sangat terbuka.
- c. Paradoks berikutnya adalah di satu sisi menimbulkan percepatan proses produksi dan sirkulasi sektor riil, namun di sisi yang lain kurang mendorong kebijakan ke arah *multiple exchange rate system* (Mackie, 1995) Jika ini berlangsung secara terencana maka akan sangat berpengaruh terhadap kuatnya arus kapital ke dan dari daerah, serta sektor moneter ini akan semakin asing terhadap sektor riil (*the free flow of capital into and out of the region*).

Furnivall (1944) dalam melihat perdebatan strategi ekonomi berbasis ekspor lebih cenderung melihat dalam kerangka *Free Trade Economy*. Menurutnya, dalam sistem *free trade economy* kebijakan yang perlu dikedepankan adalah terletak pada kebijakan hukum tarif yang menempatkan perbedaan tarif bagi investor, baik asing maupun domestik. Lebih lanjut menurut Furnivall, Kebijakan diferensiasi tarif ini akan semakin memberikan nilai *balance of payment* guna meningkatkan kepentingan ekonomi domestik. Meskipun demikian, Furnivall tidak setuju apabila kebijakan diferensiasi tarif ini diberlakukan sangat ketat, karena hal itu akan menyalahi *free trade economy*. Kalau akibat yang ditimbulkan justru semakin membatasi berlakunya model *free trade economy*, maka kebijakan diferensiasi tarif harus dihapuskan.

Berbeda dengan Furnivall, Patrick Guinness (1994) justru menolak kebijakan *free trade economy*. Guinness meragukan kemampuan *domestic enterprises* dalam melakukan kompetisi terhadap *foreign enterprises*. Argumentasi yang dibangun oleh Guinness adalah logika pasar lebih sulit dipahami dan ditaklukkan dari pada meningkatkan daya kompetitif bagi pelaku ekonomi. Lebih jauh Guinness mengisyaratkan bahwa munculnya kapitalisme lokal dengan model *free trade economy*, akan menciptakan kapitalisme lokal yang hanya akan menjadi media intervensi berbagai produk metropolitan yang akan menyebabkan budaya

konsumerisme. Hal inilah yang sering menjadi pertanda dimulainya kapitalisme pinggiran (*marginalized capitalism*).

Bell (1978), kapitalisme semacam ini meskipun didukung dengan *high capital circulation*, tetap akan menyebabkan hilangnya demokrasi ekonomi dan inflasi yang tinggi. Sebab utamanya adalah *export-import ratio* tetap tinggi yang diperkirakan juga berakibat pada harga yang tinggi. Prediksi Bell tersebut hanyalah merupakan elemen-elemen kecil dari komposisi kapital yang lebih luas yang didukung oleh birokrasi dan teknokrat. Hal yang lebih menjadi perhatian dan yang paling dikhawatirkan oleh Bell adalah akan munculnya proses alienasi sumber-sumber ekonomi dari pelaku ekonomi ditingkat paling bawah yaitu tenaga kerja, modal dan *domestic enterprises*. Model ini oleh pengamat seperti J.A. Winters (1960), R.W. Hefner (1990), Robison (1986, 1996) dan Schwarz (1994) sering terlibat di daerah-daerah yang memiliki produk internasional termasuk produk ekspor. Boeke (1953) sering menggunakan istilah terpisahnya secara tegas antara sector sub-sistem dan kapitalis sebagai bentuk dualisme ekonomi.

Terpisahnya antara dekonomi kapitalis dengan ekonomi subsisten akan membawa distorsi ekonomi bahkan sosial politik pada tingkat bawah. Kapitalisme pada tingkat tertentu selalu berada pada tekanan-tekanan hegemonik yang sangat berimbang pada sistem ekonomi lokal. Memang benar apa yang disinyalir oleh Schiller (1996) maupun The Kian Wie (1994) yang justru *domestic enterprises* yang didukung oleh usaha-usaha ekspor-impor dengan tanpa mempertimbangkan pelakunya, akan mengarah pada proses perkembangan yang cukup pesat. Lebih jauh Schiller dan The Kian Wie mengatakan bahwa dampak peningkatan ekspor dalam skala makro justru akan meningkatkan ukuran kualitatif dari jenis kapital, tenaga kerja dan terjalannya skala "*backward*" dan "*forward*" di bidang makro dan mikro ekonomi.

Meskipun demikian, sindiran tajam yang dilontarkan Schiller justru terjadi di Jepara terutama pada masa Orde Baru, bahwa secara politis, peningkatan usaha-usaha produk mebel Jepara pada tingkat ekspor telah menciptakan budaya-budaya neo-feodalisme baru yang didukung oleh kapitalisme ekonomi di tingkat local. Proses feodalisasi model ini sering muncul pada tingkat birokrasi dengan demikian dimungkinkannya gejala "*quasi legal income*" yang disinyalir semakin meningkatkan beaya produksi.

## PENGEMBANGAN EKONOMI INDUSTRI MEBEL: PONDASI OTONOMI?

Laporan tahun 1975, menunjukkan bahwa hampir 5.000 pengusaha industri atau sekitar 1,5 % terdaftar dalam data statistik kabupaten, di sektor perdagangan

mencapai 11 % atau sekitar 40.000 orang, 8 % atau sekitar 30.000 orang bergerak di sector industri terutama sebagai buruh, dimana mereka menempati kira-kira 10-15 orang setiap unit usaha (Schiller, 1996)

Berdasarkan pada data statistic pemerintah tahun 1980 tidak kurang dari 68 % dari seluruh aktivitas ekonomi penduduk Jepara berada pada sektor utama. Sedangkan 33% berada di sector pertanian milik sendiri, 30% sebagai buruh tani dan tidak memiliki tanah, 4% sebagai nelayan dan 10% sebagai pekerja di sektor industri, 11% sebagai buruh pabrik, 4% sebagai pekerja konstruksi dan 2% dibidang transportasi dan 5% sebagai pegawai negeri dan pensiunan (Schiller: 1996: 42). Data di atas dapat dibaca dengan memperkirakan bahwa sejak tahun 1980-an, akibat perkembangan sector industri, sub-sektor industri mebel telah memunculkan prediksi-prediksi diferensiasi ketenagakerjaan. Tidak hanya muncul diferensiasi, tetapi juga muncul gejala tenaga kerja rangkap, antara pertanian and industri, perikanan dengan industri, sehingga data yang diperoleh perlu dilihat kembali. Oleh karena itu penghitungan statistik di atas perlu dilihat kembali.

Pada perkembangan selanjutnya, diferensiasi ketenagakerjaan mulai berkurang dan semakin mengarah ke industri mebel. Hal ini tampak pada data dekade berikutnya yang terlihat pada tabel di bawah ini;

**Tabel 1**  
**Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Industri Mebel**

Tahun	1995	1996	1997	1998	1999
Jumlah Tenaga Kerja	32.624	35.324	38.264	38.264 [sic]	45.780
Jumlah Unit Usaha	2.216	2.347	2.493	3.008	3.865

Pada tahun 1990-an, quota produksi mebel semakin meningkat hal ini juga menyebabkan permintaan bahan baku juga meningkat tajam. Menurut catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kebutuhan bahan baku/m<sup>3</sup> beranjak dari tahun ke tahun. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan kebutuhan bahan baku yang dihitung per-tahun menjelang krisis 1998.

Tabel 2  
Perkembangan Keberhasilan Bahan Baku

Tahun	Kebutuhan Bahan Baku (m3/tahun)	Nilai (Rp)	Keterangan
1995	186.500	138.969.750.000	
1996	213.571	162.843.050.000	
1997	350.000	237.600.000.000	
1998	420.000	568.400.000.000	
1999	482.000	568.480.000.000	

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jepara, 2000

Perlu menjadi bahan pertimbangan di sini adalah ketika dilihat dari data yang menjadi Laporan Pelaksana Program Kerja Pantjatapda Tahun 1006-1998, ternyata ada perbedaan angka yang cukup besar dengan apa yang dilaporkan dinas tersebut di atas. Perbedaan itu terletak pada kebutuhan bahan baku untuk tahun 1995 yang mencapai 1.255.200 m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan untuk tahun 1996/1997, mencapai 1.550.500 m<sup>3</sup>/tahun (Laporan Pelaksanaan Program Kerja Pantjatapda, 1998).

Perbedaan itu jelas sekali tampak justru pada saat kritik-kritik terhadap Orde Baru semakin menguat yang nanti justru melahirkan gelombang reformasi 1998. Pada periode reformasi yaitu sejak tahun 1998-1999, justru Jepara mengalami kelimpahan bahan baku yang diakibatkan oleh "penjarahan massal" terhadap hutan jati di Jepara. Penjarahan itu cukup memberi arti bagi perkembangan kebutuhan bahan baku bagi industri mebel ini, apalagi jika dilihat tingkat kebutuhan industri yang mencapai rata-rata 360.000 m<sup>3</sup>/tahun hanya bias dipenuhi oleh Perhutani sekitar 327.000 m<sup>3</sup>/tahun.

Secara kualitatif, peningkatan permintaan bahan baku pada sector industri mebel ini menjadi petunjuk bahwa sejak tahun 1994-1999 sektor industri mebel mulai menjadi sector utama dalam perekonomian Jepara. Meskipun pada tahap tertentu telah menimbulkan masalah besar terutama terjadinya perbedaan yang menyolok antar pengusaha pengrajin dan pengekspor. Hal ini karena tidak ada *controlling system* yang signifikan dalam mengatur mekanisme hubungan antara

pengusaha besar dan kecil terutama dalam penentuan barang belum jadi, dan barang setengah jadi yang diperoleh dari para artisan atau pengrajin secara langsung.

Peningkatan jumlah produk dan nilai produksi berakibat pada terkonsentrasinya tenaga kerja ke industri mebel. Hal ini sangat berpengaruh pada turunnya produktivitas komoditas lain. Bukan hanya tenaga kerjanya, tetapi juga jumlah produk yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Sebagai contoh, industri kerajinan rotan yang pada tahun 1995 mampu melakukan ekspor dengan volume ekspor 12.225 dengan nilai produk sekitar Rp. 802.800.000, maka pada tahun 1996 dan juga sama nilai volumenya pada tahun 1997, mencapai nilai produk Rp. 855.390.000. Sejak tahun 1997, tidak ada lagi laporan mengenai ekspor industri rotan. Bisa jadi, hal ini disebabkan karena bergeraknya tenaga kerja dari sector industri satu ke industri yang lain, dalam hal ini dari industri rotan ke industri mebel.

Hal lain yang terjadi juga pada industri tenun ikat yang pada tahun 1994 sudah mencapai 1643 unit perusahaan yang tersebar di 9 desa utama yang terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pecangaan dan Kalinyamatan. Pada periode antara tahun 1994 sampai 1996, produk industri tenun ikat ini mencapai nilai ekspor USD 5.675. Sejak tahun 1997, industri tenun ini, tidak lagi melakukan ekspor karena nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika cukup tajam, di atas Rp 14.000 per dolar. Kondisi ini juga mengakibatkan eksodus tenaga kerja dari industri ke tenun ke industri mebel.

Kasus yang cukup perlu mendapatkan perhatian adalah munculnya fenomena baru industri konveksi sejak tahun 1994. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nilai produksi rata-rata mencapai Rp 2.000.000.000/tahun. Hal ini juga berdampak semakin tersebar nya jumlah tenaga kerja terutama tenaga kerja tak terdidik dan pekerja perempuan.

Jejara pada tahun 1994 sampai tahun 1999, mengalami peningkatan volume industri dari suatu sub-sektor, tetapi mengalami penurunan di sub-sektor lain. Model *survival economic strategy* tampaknya sangat mewarnai model perkembangan ekonomi di Jepara. Pihak Pemerintah Daerah pun belum mampu mengendalikan perputaran sektor-sektor ekonomi, terutama sub-sektor industri. Prinsip terhadap model perekonomian *consolidation economic strategy* (CES) masih jauh dari pola dan strategi ekonomi pada tingkat lokal (White, 1991). Pada hal menurut White, model CES ini sangat ampuh untuk menyeimbangkan produktivitas suatu komoditas dari sub-sektor terhadap sub-sektor lainnya atau bahkan antara sector satu ke sektor lainnya. Untuk suatu kasus di Jepara, terpuruknya suatu sub-sektor selalu memunculkan sektor atau sub-sektor baru.

Dengan kata lain, kekuatan pasar menjadi isu penting dalam melihat perubahan ekonomi di Jepara.

Tidak hanya itu, dengan percepatan perpindahan dari suatu sub-sektor ke sub-sektor yang lain atau dari satu sektor ke sektor lain, adalah bukti bagaimana ketidakberdayaan pemerintah dalam mengambil kebijakan secara tepat, terutama selama krisis, menjadi persoalan yang serius. Pasar telah menjadi panglima dalam perputaran ekonomi lokal. Pondasi struktur ekonomi kemudian sangat tergantung fluktuasi pasar. Pada hal, dalam pandangan Furnivall yang pernah mengkaji pluralisme ekonomi pada zaman Belanda, selalu berpijak bahwa persiapan otonomi daerah dengan hanya mengandalkan satu komoditas dalam sub-sektor, terasa sangat berat ketika beban produksi dari suatu sektor akan selalu menanggung berbagai sektor lain. Karena pada dasarnya tidak ada model ekonomi yang dapat dikembangkan hanya mengandalkan satu sektor tanpa melibatkan sektor lain (Furnivall, 1994), dengan kata lain, *economic sustainability* akan tercapai jika pluralitas aktivitas ekonomi menjadi kerangka *grand design* dalam pembangunan ekonomi lokal.

## LEMAHNYA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN EKONOMI

Pada tahun 1998, data Laporan Program Kerja Pantatapda II Kabupaten Dati II Jepara menyebutkan bahwa paling tidak ada beberapa pos unit usaha yang masih melakukan kegiatan ekspor sampai tahun 2000-an. Industri mebel yang memiliki nilai ekspor mencapai Rp. 522.730.000/tahun telah menjadi produk unggulan Kabupaten Jepara pada tahun 2000-an. Pada tahun-tahun terakhir, realisasi tingkat volume ekspor mencapai 1.564.920 PCS/tahun. Nilai harga dari sejumlah produksi tersebut mencapai USD 123.763.217,50 dengan sekitar 59 negara tujuan ekspor. Hal ini memunculkan persoalan kebutuhan bahan baku, terutama kayu jati yang rata-rata mencapai 360.000 M<sup>3</sup>/tahun.

Hasil investigasi sumber ekspor awal tahun 2000-an itu menunjukkan betapa besar konsentrasi ekonomi Jepara lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi industri, terutama mebel. Hal ini juga karena dukungan infrastruktur, skill, Penanaman Modal Asing (PMA) yang kuat. Kebijakan yang lebih mengarah pada ekonomi korporatis itu, telah memunculkan berbagai model ekonomi pada tingkat kedua, ketiga dan seterusnya. Hal ini karena jaringan industri mebel ini sangat kuat yang tidak hanya jaringan permodalan, pasar dan skill tenaga kerja, namun juga karena jaringan "monopoli" yang cukup kuat, terutama dikalangan pelaku PMA.

Salah satu faktor yang penting dalam dilihat adalah adanya keterkaitan kelembagaan dari penyediaan bahan baku, permintaan tenaga kerja, standaradisasi

upah (gaji), jaminan social, kualitas produk dan masing-masing memberikan peluang bagi pengembangan ekonomi lainnya seperti ekonomi subsisten yang mengandalkan sektor domestik

Disamping industri mebel, yang cukup menarik juga adalah industri kapok randu yang memiliki potensi produksi sekitar 8.270 ton/tahun. Volume ekspor dari tahun ke tahun sekitar 496.512 kg/tahun. Karet juga memiliki peluang ekspor yang cukup baik, yang semula ditujukan untuk komoditas ekspor dengan total produksi mencapai 1.797.638 kg/tahun dengan nilai ekspor mencapai USD 1.154.741 dengan jumlah Negara tujuan sekitar 5 negara. Produksi coklat juga sangat penting sebagai produk substitusi ekspor yang mencapai total produksi 359.150 kg/tahun. Pada hal realisasinya mencapai 1.999.125 kg/tahun dengan perkiraan nilai ekspor USD 296.853 kg/tahun dengan jumlah Negara tujuan 4.

Hasil penilaian awal berdasarkan pada hasil observasi dan validasi nilai ekspor khususnya komoditas unggulan Jepara menunjukkan bahwa :

- a. Sebagai modal pengembangan ekonomi kawasan, terutama pedesaan, tiga contoh industri tersebut diatas telah memberikan petunjuk bahwa pengembangan ekonomi pada tingkat daerah (*local*) perlu adanya partisipasi domestik,
- b. Proses partisipasi itu tidak hanya dalam keikutsertaan dalam proses produksi, tetapi juga pada tingkat manajerial yang langsung melibatkan pelaku ekonomi domestik.
- c. Kedua isyarat di atas memberikan jaminan bahwa pelaku ekonomi betul-betul memanfaatkan SDM, infrastruktur, serta fasilitas yang lain sebagai bentuk jaringan kelembagaan yang kuat.

Data-data yang didapat di pos Anggaran Daerah, menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan yang cukup signifikan terutama dari pos sisa Anggaran Tahun Lalu, PAD, Laba Perusahaan Milik Daerah dan Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga, Penerimaan Lain-Lain, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Bukan Pajak, SDA, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pinjaman daerah dan sebagainya yang pada tahun 2000 mencapai Rp. 94.727.991.000,00. Pada tahun 2001, ada kenaikan pendapatan daerah yang cukup fantastic yaitu mencapai kenaikan 150% setara dengan sekitar Rp. 262.943.554.000,00.

Mendasarkan pada spekulasi penggunaan dana anggaran itu bukan persoalan yang mudah, ketika persoalan sektoral tidak dapat teratasi. **Pertama**, yang terkait

dengan persoalan kebijakan keuangan dengan menggunakan model pemusatan peminjaman (*loan concentrates*). Kegagalan utama berbagai program peminjaman bagi industri kecil dan menengah, baik sektor industri, pertanian atau perikanan dan kelautan, biasanya terkait dengan model kebijakan keuangan tersebut. Artinya, apapun jenis produk finansialisasi (pinjaman, bantuan, hibah maupun kredit lunak) sebenarnya merupakan “alat” untuk menarik uang dari masyarakat. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai distributor sirkulasi dana, tetapi juga akan menjadi bumerang hancurnya tataekonomi pedesaan. Karena pemerintah sengaja menghadapkan ekonomi domestik (pedesaan) dengan ekonomi pasar yang sering memunculkan hukum rimba. Jika hal itu terjadi, maka apapun program pengembangan yang berbasis pada pertanian, industri maupun perikanan yang berbasis desa akan mengalami kegagalan dan ini menjadi paradoks pembangunan ekonomi pedesaan. Karena model kebijakan diatas justru akan menyedot kapabilitas finansial masyarakat dalam kubangan hutang yang diukur berdasar sentimen pasar.

**Kedua**, Pemerintah juga telah terjebak pada model *balance of payment system* yang berbasis pada ekonomi lokal dan kawasan. Asumsi dasar model ini adalah memberikan jaminan keseimbangan pengeluaran dan pendapatan daerah, tetapi yang menanggung justru masyarakat. Peletak dasar ekonomi ini lebih dititik-beratkan pada penyelenggaraan anggaran yang stabil dan paralel dengan kebutuhan yang ada. Kebijakan ini telah mengakibatkan penyamarataan kasus-kasus ekonomi berskala mikro dengan makro. Artinya semua produk ditargetkan menuju kearah produksi ekspor dan tidak dipertimbangkan kekuatan pasar lokal yang justru sering memberikan peluang bagi usaha-usaha dan produk skala mikro. Fasilitas itu tidak pernah digarap secara serius, sehingga pasar-pasar tradisional dan lokal perlu diantisipasi kembali guna menciptakan *linkage-linkage* baru yang bersekala mikro, baik sektor pertanian, industri maupun perikanan dan kelautan.

Beberapa data yang diperoleh menunjukkan bagaimana kebijakan ini telah mengakibatkan surplus sektor riil ketimbang responsi pasar lokal yang mungkin lebih apresiatif. Ketidakseimbangan itu dapat dilihat misalnya ekspor karet sama kapok randu, produk mebel dengan rotan atau bambu, juga hasil industri tenun yang sangat fluktuatif dan *unpredictable*.

Kondisi riil seperti itu akan sangat mempengaruhi pola ekonomi pedesaan yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi makro. Paling tidak, beberapa bahan baku, SDM, skill, dan lahan sangat tergantung pada kawasan pedesaan. Kepincangan kebijakan ini berakibat sangat fatal pada saat satu sektor mengalami *collapse*, maka sering diikuti sektor-sektor yang lain. Atau sebaliknya, jika salah

satu produk ekspor mengalami *booming*, maka sektor yang lain mengalami *collapse*. Sebagai contoh, pada saat industri mebel mengalami *booming*, maka sektor-sektor lain seperti pertanian, perkebunan dan hortikultura, serta produk-produk potensi ekspor lain mengalami penurunan volume. Hal ini diakibatkan juga oleh terserapnya sumber daya pedesaan ke salah satu sektor.

Konsentrasi kebijakan ekonomi kawasan lebih menitikberatkan pada pasar dan belum mengarah pada analisis pelaku ekonomi. Kekuatan sentiment pasar lebih dilihat sebagai peluang dalam sector-sector tertentu, tetapi kurang memperhatikan sektor-sektor terkait. Tanpa adanya rancangan kekuatan ekonomi domestik dengan basis pedesaan dan kawasan, akan meruntuhkan kekuatan ekonomi lokal itu sendiri. *Link-link* perlu dikembangkan kembali sehingga, keterkaitan antarsektor dan antarkawasan menjadi kekuatan local yang cukup antisipatif terhadap kekuatan ekonomi supralokal. Apa yang diprediksi oleh Kataouzian, seorang ekonomi dan ahli studi pembangunan Iran (Kataouzian: 1981), bahwa hamper semua sektor (pertanian, industri maupun perikanan dan kelautan) ketika masih berbasis pada kawasan pedesaan dan tidak dibarengi dengan kebijakan terpadu kawasan akan cenderung mengarah ke kapitalisme yang *pseudo-modernism*. Yaitu, bahwa pembangunan yang dijalankan sering sudah menggunakan fasilitas modern, tetapi pendukungnya masih pada taraf tradisional. Sebagai akibatnya volume ekspor sektor tertentu atau volume produk tertentu, tidak selalu diimbangi dengan nilai ekspor yang signifikan.

Ada beberapa indikator yang tampak pada skema kebijakan ekonomi di Jepara;

1. Realisasi investasi pemerintah Jepara yang belum mencapai lebih dari 56,3 %
2. Akibat penurunan secara drastis semua tabungan pemerintah dan swasta yang disebabkan oleh penurunan beberapa komoditas ekspor, terutama sektor pertanian, industri dan perikanan, tetapi sebaliknya semakin meningginya pembiayaan infrastruktur domestik yang harus ditanggung.
3. Di satu sisi, di sektor riil, optimalisasi produksi belum sepenuhnya diusahakan akibat melemahnya sistem manajerial finansial akibat *over bureaucracy*.

Sektor industri hampir meliputi semua wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara. Masing-masing kecamatan memiliki indikasi dan arah pengembangan yang berbeda, namun jika sektor ini dilihat secara simultan, maka tampak sekali bahwa apabila di beberapa wilayah kecamatan memiliki batasan koridor yang searah,

akan memiliki ciri kegiatan industri yang sama. Hal ini karena beberapa penentu kawasan industri tidak hanya potensi wilayah serta jenis produk dan produktivitas, tetapi juga faktor-faktor sosial, kelembagaan ekonomi dan juga ekonomi makro yang sangat fluktuatif. Oleh karena itu sentra industri tidak selalu berada pada kawasan tertentu, tetapi pada saat yang berbeda dapat berubah baik jenis komoditas maupun kawasannya.

Dari hasil reevaluasi data yang bersifat atribut maupun raster sampai pada tahun 2004, ditemukan beberapa kegiatan industri dengan sentra yang relatif sama. Pergeseran hanya pada tingkat desa atau *hinterland* dan tidak begitu pengaruh pada identifikasi kawasan. Keunggulan kajian kawasan dari wilayah maupun DPP-KTP2D terletak pada penentuan sentra-sentra ekonomi berbasis sektoral. Hal ini karena masing-masing sektor sering bergeser dan bergerak terutama sector industri. Dengan basis kawasan, tata ruang pada basis administratif tidak begitu berpengaruh kecuali tingkat aksesibilitas yang cukup kuat antarsektor.

Kegiatan utama industri yang terkait antarsektor dapat dilihat sebagai berikut:

1. usaha industri untuk barang-barang yang menunjang kegiatan pertanian, perikanan dan perkebunan.
2. usaha industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan perkebunan
3. usaha industri penunjang kegiatan industri utama termasuk jasa.

## MENUJU KEBIJAKAN BARU EKONOMI DAERAH

Peta perkembangan desa-desa industri di Jepara sampai saat ini belum memberikan informasi yang cukup. Hal ini disebabkan karena:

- a. Pertumbuhan industri di Jepara lebih merupakan model pertumbuhan pasif dikarenakan hampir semua jenis industri dikerjakan berdasarkan pada respon terhadap pasar.
- b. Belum terintegrasinya berbagai elemen industri dari hulu sampai hilir sebagai *supporting system* terhadap pertumbuhan dan perkembangan industri dan sosial-ekonomi kawasan pedesaan.
- c. Belum adanya dukungan maksimal baik dari Pemerintah, sektor perbankan, maupun lembaga-lembaga lain yang terkait dengan industri pedesaan, baik dalam hal promosi, sortasi, intelejen pasar sampai *control quality* dan sebagainya.

Beberapa jenis industri di pedesaan Jepara yang menjadi produk khas misalnya pande besi, gerabah, genteng, konveksi, industri monel, emas, tenun ikat, rotan dan beberapa industri *handicraft* serta beberapa produk makanan dan minuman yang menjadi industri rumah tangga. Beberapa industri yang muncul di pedesaan tersebut tidak hanya memiliki kekhasan dari masing-masing desa, tetapi juga menjadi daya tarik penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan dalam mengatasi limpahan tenaga kerja di pedesaan. Pada sektor industri rumah tangga misalnya, beberapa kasus seperti krupuk bawang dan kacang di Desa Purwogondo, konveksi di Desa Sendang, Tenun ikat di Desa Troso, industri rokok di Desa Robayan serta industri rotan di Teluk Kulon dan Manyargading telah memberikan kontribusi ekonomi yang cukup bagi perekonomian desa.

Jika dilihat dari pasar yang dijalankan, jaringan perdagangan sektor industri kecil ini dikembangkan tidak hanya pada jaringan pasar desa, kecamatan maupun kabupaten tetapi sudah antarpropinsi bahkan ekspor. Kemudahan transportasi juga menjadi bahan pertimbangan lain, disamping juga dukungan infrastruktur termasuk kedekatan dengan pusat-pusat kota baik Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Jawa Barat dan DKI Jakarta. Beberapa kota yang menjadi mitra jaringan perdagangan sektor industri Rumah Tangga adalah Surakarta, Semarang, Surabaya, Tuban, Bojonegoro, Yogyakarta, Jakarta. Juga beberapa produk komoditas sudah ada yang mencapai pasar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara Barat dan Bali.

Potensi industri mebel misalnya, berdasarkan laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 1998 menunjukkan sejumlah desa yang memiliki potensi dan pendukung industri mebel. Kecamatan Keling ada 10 desa, Kecamatan Bangsri ada 16 desa, Kecamatan Mlonggo ada 14 desa, Kecamatan Jepara memiliki 14 desa, Kecamatan Tahunan memiliki 15 desa, Kecamatan Mayong hanya ada 3 desa, Kecamatan Pecangaan memiliki 10 desa, Kecamatan Batealit tidak kurang dari 9 desa dan Kecamatan Welahan memiliki 9 desa. Data jumlah desa potensi mebel itu tidak dihitung berdasarkan jenis dan tipologi industri, juga belum dihitung berdasarkan pada *supporting system* yang ada di desa termasuk tenaga kerja, bahan baku dan hilangnya beberapa sektor ekonomi desa akibat terserap ke sektor industri. Pada tahun 1999, Kecamatan Kedung juga berpotensi industri mebel dengan munculnya 9 desa potensi industri (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jepara, 1998).

Jika dijumlah desa-desa yang memiliki potensi industri mebel pada tahun 1999 ada sekitar 103 desa di Jepara yang berpotensi berkembang menjadi desa industri mebel. Suatu perkembangan yang cukup cepat apabila dilihat dari tahun

1995 hanya ada 80 desa, tahun 1996 ada 83 desa, 1997 ada 86 desa pada tahun 1999 ada 103 desa.

Hal ini sangat penting dilihat bagaimana desa-desa di Jepara memiliki potensi yang cukup dalam industri mebel. Bukan hanya industri mebel tetapi dapat juga dilihat dari jenis industri lain seperti tenun ikat, monel, konveksi, besi maupun bambu dan rotan. Jika dilihat dari peta Kabupaten, penyebaran wilayah industri mebel ini cukup merata kecuali Kecamatan Mayong yang hanya memiliki 3 desa dan Kecamatan Welahan yang hanya 4 desa, juga Kecamatan Karimun yang belum mengarah ke sektor industri mebel. Beberapa kecamatan cukup dinamis di sektor ini yaitu Kecamatan Pecangaan, Mlonggo, Kedung, Bangsri, wilayah Tahunan dan Batealit, bahkan Tahunan dan Bandengan merupakan wilayah yang hanya mengerjakan *finishing*.

Jika dilihat dari arah dan kecenderungan penyebaran sektor industri ini lebih banyak mengarah ke wilayah Utara dan Selatan. Hal ini di samping didukung oleh infrastruktur yang cukup, antara lain sarana dan prasarana termasuk modal, transportasi, hubungan relasional dengan investor maupun jumlah tenaga kerja yang cukup di wilayah ini. Sementara ini disimpulkan bahwa tersedianya banyak tenaga kerja sektor industri di wilayah tersebut di atas lebih dikarenakan sektor-sektor pertanian dan perkebunan kurang memberikan pendapatan bagi masyarakat. Pergeseran orientasi ekonomi desa ini sangat tampak sekali sejak tahun 1990-an. Sampai pertengahan tahun 1990-an, PDRB Kabupaten Jepara masih didominasi sektor pertanian yang mencapai 47%, pada tahun-tahun berikutnya sektor pertanian mulai menurun sampai 43% bergeser ke sektor perdagangan barang industri lain dan jasa (PKPEK, ASEMHAKE dan USAID, 2002).

Lepas dari persoalan yang menghimpit sektor mebel sejak tahun 2001 dengan semakin lemahnya sektor ini, ada beberapa hal yang dapat dijadikan dasar pertimbangan memunculkan konsep kawasan industri: Pertama, bagaimanapun juga dengan kasus industri mebel di Jepara telah menciptakan peluang kerja dan peningkatan sarana dan prasarana industri sampai pada tingkat desa. Kedua, dengan industri mebel, tingkat mobilisasi tenaga kerja semakin cepat walaupun tertuju pada sektor industri mebel. Ketiga, dinamika ekonomi pedesaan semakin cepat, hal ini ditunjukkan dengan perubahan orientasi dan gaya hidup di tingkat desa. Keempat, semakin tingginya pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk pergudangan dan aktivitas industri mebel ini.

Jika dilihat secara makro, data deskriptif mengenai kawasan industri sebenarnya sudah memberikan cakupan yang signifikan dalam menunjang sektor lain. Diambil contoh misalnya, industri yang berbasis pertanian dan perkebunan,

beberapa catatan dibawah menunjukkan adanya potensi dan peluang dalam sector industri yang mengarah pada sector pertanian. Juga jika dilihat di beberapa kawasan tampak bahwa sector industri sangat penting untuk menunjang kegiatan sector perikanan dan kelautan. Keperpihakan pemerintah di sector industri rumah tangga belum maksimal, sehingga kegiatan sector industri ini masih berada pada kawasan tertentu dan relatif monoton.

**Tabel 3**  
**Hasil Identifikasi Produk Berdasarkan Penghitungan Rata-Rata pada Harga Konstan Sampai Tahun 2005**

No	Nama produk	Lokasi kecamatan	Nilai investasi (Rp.000)	Produksi/ton	Nilai (Rp.000)	Keterangan
1	tempe	Jepara, keling, welahan, Nalumsari, mayong bangsri, batealit	139,500	1.226	6.130.000	
2	Ikan asin	Jepara, kedung	55.500	6.014	48.112.000	
3	Pengas apan ikan	Jepara, Pecangaan, Bangsri, Kalinyamatan	37.000	528	3.168.000	
4	garam	kedung	245.00	6.720	64.784	
5	Tepung aren	kedung	33.750	1.620	810.000	
6	krupuk	Kedung, welahan, jepara	85.250	963	8.964.000	Krupuk tengiri di Jepara
7	Gula tumbu	Nalumsari				Tidak tercatat
8	roti	welahan	106.000			Data tidak tercatat
9	tape	Nalumsari	7.500	180	360.000	
10	terasi	kedung	8.500	3,75		Tidak tercatat
11	Kacang oven	Jepara, tahunan, kalinyamatan	12.500	150		Tidak tercatat
12	Rokok kretek	Kalinyamatan, welahan	989,250	3.742.5000.000 (?)	261.975.000	

Sumber: Laporan FSPD, Jepara 2006 dan data kualitatif hasil interview dengan staf Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

## KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi terutama yang terkait dengan industri mebel di Jepara pada sebelum dan sesudah krisis 1998 menunjukkan kecenderungan

perbedaan yang cukup tajam. Sebelum dan pada saat krisis, ekonomi sector industri terutama sub-sektor industri mebel menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini karena kebijakan yang diambil lebih mengarah pada pasar bebas (*Free Trade Economy*). Melalui pola ini, pemerintah tidak banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi karena hukum ekonomi diserahkan pasar.

Kepercayaan pasar menjadi penentu dalam dinamika ekonomi industri di Jepara. Hal ini kemudian dimanfaatkan para eksportir baik lokal maupun asing. Pertumbuhan ekonomi semakin signifikan, walaupun banyak efek yang ditimbulkan justru akan menjadi persoalan setelah krisis 1998. Salah satu efek yang paling krusial dalam perkembangan sector industri adalah perilaku pengusaha yang hanya bergerak pada segmen produksi dan distribusi. Hal ini cukup memberikan arti bagi sector lain, namun akan berdampak pada rapuhnya sistem ekonomi industri ini pada saat pasca krisis. Karena modal dasar para pengusaha lebih tergantung pada kebijakan ekonomi makro.

Krisis 1998 adalah suatu bentuk hancurnya sistem ekonomi makro. Pada kenyataannya, krisis itu sangat berpengaruh pada struktur dan sistem ekonomi lokal. Dampak yang ditimbulkan memang tidak terjadi pada saat krisis, namun pada tahun 2002-2005, perkembangan ekonomi subsektor industri mebel ini mengalami guncangan yang cukup parah. Ekonomi sublimatif kemudian menjadi alternatif untuk mengatasi guncangan itu. Munculnya beberapa jenis industri baru seperti industri rokok, industri kerajinan monel dan perkembangan industri non-farm, cukup memberikan bukti bagaimana guncangan ekonomi subsektor mebel ini terjadi di Jepara. Pemerintah dalam hal ini kurang memperhitungkan dan membangun kebijakan untuk mengatasi dampak krisis ini.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak membuat kalkulasi yang tepat terutama yang terkait dengan hadirnya investor asing, pelaku ekonomi asing, termasuk mempertimbangkan tanggungan pra-produksi sampai pasca produksi. Pemerintah yang seharusnya memiliki otoritas moneter dan kebijakan ekonomi tidak mampu menanggung semua biaya pra dan pasca produksi. Inilah kemudian yang menimbulkan paradoks perkembangan ekonomi di Jepara pada saat kapitalisme korporasi semakin menjadi tolok ukur pembangunan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Akhyat, 1999, "Kontradiksi Kapitalisme: Jepara dalam Wacana Global", paper pada seminar tentang Jepara Menyambut Otonomi Daerah, KJY Yogyakarta
- Asmindo Komda Jepara, "Daftar Penanggung Jawab Perusahaan Mebel", *Stensilan*.
- Bell, D., 1978, *The Cultural Contradictions of Capitalism*, Basic Books, Inc. New York.
- Boeke, J.H., 1953, *Economics and Economic Policy of Dual Societies: Ad Exemplified By Indonesia*, H.D. T'jeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem.
- Booth, A., 1995, "International Trade and Domestic Economic Development: An Indonesian Case Study", paper pada *Summer Course in Modern Indonesian Economic History*, UGM-Leiden University.
- Furnivall, J.S., 1944, *Netherlands India: A study of Plural Economy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Hill, H., 1994, *Indonesia's New Order: The Dynamics of Socio-Economics Transformation*, Hawaii University Press, Honolulu.
- Hefner, R. W., 1994, *The political Economy of Mountain Java: An Interpretative History*, California University Press, Berkely, California.
- Katouzian, H., 1981, *The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism 1926-1979*, Mcmillan Press, London.
- Pemda Dati II Jepara, 1998, "Data Komoditas Ekspor Unggulan Kabupaten Jepara", *stensilan*.
- Pemda Dati II Jepara, "Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Jepara no. 977/196.b/1994", *salinan*.
- PKPEK, ASEMHAKE, 2002, *Kajian Hambatan Usaha Sub Sektor Furnitur*, PKPEK, ASEMHAKE dan USAID.
- Robison, R., 1986, *The Rise of Capital*, Allen & Unwin Pty, Ltd., New South Wales.
- Schiller, J., 1996, *Developing Jepara, State and Society in New Order Indonesia*, Monash Asia Institute, Clayton.
- , 1990, "State Formation and Rural Transformation: Adapting to the "New Order" in Jepara" dalam Arief Budiman, ed., 1990, *State and*

*Civil Society in Indonesia*, Aristec Press, Glen Waverly.

Schwartz, A., 1994, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990's*, Allen and Unwin Pty.Ltd., New South Wales.

The Kian Wie, 1994, *Exploration in Indonesian Economic History*, Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI, J, Ithaca.

Winters, J.A., 1996, *Power in Motion: Capital Mobility and The Indonesian State*, Cornell University Press

Zainuddin Djafar, 2006, *Rethinking The Indonesian Crisis*, Pustaka Jaya, Jakarta.